

Analisis Sektor/Sub Sektor Unggulan di Kabupaten Bungo

Gafur¹⁾; Muhammad Safri²⁾; Siti Hodijah²⁾

¹⁾Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

²⁾Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univ. Jambi

Abstract.

This study aimed to analyze the leading sectors in Bungo. The method used is Location Quotient (LQ), Dynamic Location Quotient (DLQ), specialization index, Growth Ratio Model (MRP). Based on analysis of LQ and DLQ, there are only two basis sectors at present and in the future, namely the construction sector and trade, hotels and restaurants. Based on the analysis of Specialization Index, in Bungo Regency has a concentration of the economy in the agricultural sector and the manufacturing sector. Based on MRP analysis also showed that prominent sector growth at the level of Bungo and Jambi Province, namely electricity, gas and water supply; the building sector; and trade, hotels and restaurants.

Keywords : Location Quotient (LQ), Dinamic Location Quotient (DLQ), Specialization Index, Growth Ratio Model

Abstrak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sektor unggulan di Kabupaten Bungo. Metode yang digunakan adalah analisis Location Quotient (LQ), Dinamic Location Quotient (DLQ), indeks spesialisasi, Model Rasio Pertumbuhan (MRP). Berdasarkan analisis LQ dan DLQ, hanya ada 2 sektor yang menjadi sektor basis pada saat ini dan pada masa yang akan datang yaitu sektor bangunan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Berdasarkan analisis Indeks Spesialisasi, di Kabupaten Bungo telah terjadi konsentrasi ekonomi pada sektor pertanian dan sektor industri pengolahan. Berdasarkan analisis MRP juga dapat diketahui bahwa sektor yang menonjol pertumbuhannya pada tingkat Kabupaten Bungo dan Provinsi Jambi yaitu sektor listrik, gas dan air bersih; sektor bangunan; serta sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Kata Kunci : Location Quotient (LQ), Dinamic Location Quotient (DLQ), indeks spesialisasi, Model Rasio Pertumbuhan

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem pemerintah pusat dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung-jawaban kepada masyarakat.

Kunci pembangunan daerah dalam mencapai sasaran pembangunan nasional secara efisien dan efektif adalah perencanaan, koodinasi, dan keterpaduan antar sektor. Pembangunan sektoral di daerah disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Tujuan kebijakan pembangunan daerah adalah untuk menyeraskan pertumbuhan dan mengurangi kesenjangan kemajuan antar daerah,

melalui pembangunan yang serasi dan terpadu antar sektor pembangunan daerah yang efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah.

Menjawab semua tantangan diatas, maka Pemerintah telah menetapkan kebijakan otonomi Daerah yang bersifat luas, nyata dan bertanggung jawab melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan di revisi melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, antara lain menyebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu kebijakan Desentralisasi berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 tidak kurang lebih dari 47 UU tentang Pemekaran atau pembentukan Provinsi dan Kabupaten telah di tetapkan. Fakta ini menunjukkan bahwa dalam perjalanan implementasi kebijakan Otonomi Daerah berupa pemekaran atau pembentukan Daerah Otonom telah banyak dilakukan, sebab melalui pemekaran atau pembentukan Daerah Otonom baru diharapkan tujuan kebijakan otonomi seperti peningkatan pelayanan, menciptakan berdemokrasi dan pemberdayaan masyarakat dapat benar-benar terwujud.

Secara makro pertumbuhan atau kenaikan PDRB dari tahun ke tahun merupakan salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan daerah. Pertumbuhan PDRB tidak lepas dari peran setiap sektor ekonomi tersebut diatas. Besar kecilnya kontribusi pendapatan setiap sektor ekonomi merupakan hasil perencanaan pembangunan sektoral yang dilaksanakan didaerah. Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan keberhasilan dalam melaksanakan strategi perencanaan pembangunan daerah dengan mengoptimalkan semua potensi, hal ini mutlak dilakukan untuk menyongsong otonomi daerah, dimana daerah dituntut secara aktif untuk melaksanakan pembangunan kemampuan sendiri tanpa tergantung dari pemerintah pusat.

Kabupaten Bungo adalah satu dari 11 (sebelas) Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi yang memiliki letak geografis yang sangat strategis karena berada di jalur lintas Sumatera, selain itu beberapa potensi penting dan strategis mempunyai peluang pasar lokal dan eksport. Sejak dari pemekaran wilayah pada tahun 1999, pembangunan ekonomi di Kabupaten Bungo memperlihatkan trend yang positif. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan mengalami pertumbuhan yang positif pada tahun 2001-2013. Selama periode 2001-2013 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bungo menunjukkan trend yang meningkat dengan rata-rata sebesar 6,48 %. Rata-rata pertumbuhan ekonomi ini bila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tidak terlalu jauh yaitu sebesar 6,61 %.

Pergeseran atau perubahan kontribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Bungo selama periode 2001-2013 dapat dilihat pada Tabel 1. Dari Tabel 1 terlihat bahwa terjadi peningkatan pada semua sektor. Peningkatan ini juga disertai dengan peningkatan peran beberapa sektor ekonomi. Sektor pertanian yang pada tahun 2001 memberi kontribusi sebesar 48,43 % mengalami penurunan menjadi 31,77 % pada tahun 2013. Disisi lain sektor pertambangan dan penggalian mengalami peningkatan peran dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Bungo dari 1,12 % menjadi 9,75 % pada tahun 2013. Pergeseran peran sektor ekonomi juga terjadi pada sektor industri pengolahan dimana pada tahun 2001 kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Bungo adalah sebesar 5,70 %, kemudian mengalami penurunan menjadi 4,69 % pada tahun 2013, sektor listrik dan air bersih mengalami peningkatan yaitu dari 0,34 pada tahun 2001 menjadi 0,60 % pada tahun

2013. Sektor bangunan memberi kontribusi yang meningkat terhadap PDRB Kabupaten Bungo sebesar 2,74 % pada tahun 2001 menjadi 9,68 % pada tahun 2013. Sementara itu sektor perdagangan hotel dan restoran mengalami peningkatan yaitu dari 17,97 % pada tahun 2001 menjadi 23,14 % pada tahun 2013, sedangkan sektor pengangkutan dan komunikasi mengalami penurunan dalam memberi kontribusi dari 8,35 % pada tahun 2001 menjadi 7,60 % pada tahun 2013. Sektor keuangan persewaan dan jasa perumahan juga mengalami penurunan yaitu dari 5,32 % pada tahun 2001 menjadi 4,24 % pada tahun 2013.

Tabel 1. Perkembangan PDRB Atas Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Bungo Menurut Sektor Periode 2001 – 2013 (Dalam Juta Rupiah)

No	Sektor	2001	Kontribusi (%)	2013	Kontribusi (%)
1	Pertanian	346.068,	48,43	509.760,24	31,77
2	Pertambangan dan Pengalihan	7.924,66	1,12	156.346,33	9,75
3	Industri Pengolahan	40.518,96	5,70	75.292,26	4,69
4	Listrik, Gas dan air bersih	2.450,79	0,34	9.631,70	0,60
5	Bangunan	19.466,22	2,74	155.284,21	9,68
6	Perdagangan ,Hotel dan Restoran	127.600,57	17,97	371.245,07	23,14
7	Pengangkutan dan Komunikasi	59.291,47	8,35	121.964,68	7,60
8	Keuangan ,Persewaan dan Jasa Perumahan	37,781,53	5,32	67.951,65	4,24
9	Jasa-jasa	71.274,07	10,03	136.811,20	8,53
	PDRB Total	710.376,64		1.604.287,35	

Sumber : BPS Kabupaten Bungo

Disisi lain, penyerapan tenaga kerja juga menunjukkan trend yang positif. Selama periode 2001-2013 kegiatan ekonomi telah menyerap tenaga kerja sebanyak 65.080 orang. Pada tahun 2001 penyerapan tenaga kerja sektor pertanian sebesar 68,38 persen dan pada tahun 2013 menurun menjadi 56,62 persen, sektor industri pengolahan pada tahun 2001 menyerap tenaga kerja sebesar 4,58 persen dan pada tahun 2013 menurun menjadi sebesar 3,86 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran pada tahun 2001 menyerap tenaga kerja sebesar 9,11 persen dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 12,81 persen, dan sektor jasa-jasa pada tahun 2001 menyerap tenaga kerja sebesar 6,62 persen dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 11,27 persen.. Hal ini menunjukkan bahwa mulai terjadi pergeseran peran sektor ekonomi dalam penyerapan tenaga kerja.

Pergeseran peran sektor ekonomi dalam penyerapan tenaga kerja juga diikuti dengan semakin membaiknya pendapatan perkapita regional. Dimana pada tahun 2001-2013 terjadi peningkatan pendapatan perkapita Rp. 2.852.199,08 pada tahun 2001 menjadi Rp. 4.491.289,16 pada tahun 2013, atau terjadi peningkatan sebesar 57,47 persen.

Struktur perekonomian suatu daerah sangat ditentukan oleh besar peranan sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Perekonomian Kabupaten Bungo sampai tahun 2013 masih didominasi oleh sektor pertanian yaitu sebesar 31,77 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu 23,14 persen, dan sektor pertambangan yaitu sebesar 9,75 persen. Begitu besarnya peranan sektor pertanian di Kabupaten Bungo hendaknya kita terus berupaya untuk meningkatkan hasil-hasil pertanian dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas yang tentunya akan berdampak pada nilai jual produk dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. Selain itu, sektor pertanian yang merupakan sektor primer akan memicu pula pertumbuhan sektor-sektor lainnya, sektor sekunder dan sektor tersier sehingga pertumbuhan setiap sektor

akan bergerak secara bersama-sama dan menentukan kemampuan sektor tersebut untuk memacu pertumbuhan masing-masing menjadi lebih cepat.

Berdasarkan data indeks perkembangan, sektor yang paling berkembang pesat sampai dengan tahun 2013 adalah sektor pertambangan dan sektor konstruksi. Indeks perkembangan sektor pertambangan pada tahun 2013 mencapai 2.329,42 atau naik 20 kali lipat dari tahun 2000. Peningkatan tersebut baik langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

Namun demikian, tidak selalu kenaikan nilai tambah sektor ekonomi tersebut diikuti dengan kenaikan kesempatan kerja untuk sektor yang sama. Sampai tahun 2013, menurut lapangan usaha, sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Kabupaten Bungo adalah sektor pertanian yaitu sebesar 56,62 persen, kemudian diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 12,81 persen, dan sektor jasa kemasyarakatan sebesar 11,27 persen.

Bertolak dari data diatas terlihat bahwa dalam pembentukan struktur perekonomian, ada sektor-sektor yang memiliki kontribusi yang besar yang dijadikan sektor unggulan yang berfungsi sebagai motor penggerak sektor-sektor perekonomian secara keseluruhan dan mendorong pertumbuhan sektor lain dengan keterkaitan antar sektor (*backward and forward linkage*). Mengingat strategisnya posisi Kabupaten Bungo baik dilihat dari letak geografis maupun peranannya sebagai titik pertumbuhan, maka sektor unggulan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah-daerah sekitarnya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sektor unggulan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bungo

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari : PDRB Kabupaten Bungo Periode tahun 2001 – 2013, PDRB Provinsi Jambi Periode 2001 – 2013, data-data lain yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi di Kabupaten Bungo dan Provinsi Jambi. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari : BPS Provinsi Jambi, BPS Kabupaten Bungo, Bappeda Provinsi Jambi dan Bappeda Kabupaten Bungo.

Analisis Data

Untuk menganalisis sektor unggulan di Kabupaten Bungo digunakan analisis LQ/DLQ, Indeks Spesialisasi dan Model Rasio Pertumbuhan (MRP).

Analisis Location Quotient (LQ) dan Dynamic Location Quotient (DLQ)

Model analisis *Location Quotient* merupakan suatu alat analisis untuk menunjang basis ekonomi wilayah terutama dari kriteria kontribusi dan laju pertumbuhan. Variabel yang digunakan dalam perhitungan sektor basis tersebut adalah PDRB wilayah dari suatu kegiatan yang dititikberatkan pada kegiatan dalam struktur ekonomi wilayah. Dengan menggunakan alat analisis LQ ini dapat dilihat kegiatan basis wilayah studi dibandingkan dengan wilayah referensi.

Dalam penelitian ini teknik analisis LQ digunakan untuk mengidentifikasi sektor unggulan (basis) dan bukan sektor unggulan (non basis) Kabupaten Bungo dari sisi kontribusi terhadap PDRB dibandingkan dengan kontribusi sektor dan subsektor ekonomi yang sama di Provinsi jambi, dengan rumus : (Bendavid – Val, 1991)

$$LQ = \frac{E_{ij} / E_j}{E_{in} / E_n}$$

Dimana :

- LQ = Koefisien *Location Quotient*
 Eij = PDRB sektor i di wilayah studi
 Ej = Total PDRB di wilayah studi
 Ein = PDRB sektor i di wilayah referensi
 En = Total PDRB di wilayah referensi

Dari hasil perhitungan LQ ini dapat diketahui bahwa apabila :

1. LQ suatu sektor > 1 menunjukkan sektor yang bersangkutan termasuk sektor basis, yang prospektif untuk dikembangkan lebih lanjut dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah dan memenuhi permintaan baik pasar lokal, regional atau nasional.
2. LQ suatu sektor < 1 menunjukkan bahwa sektor yang bersangkutan bukan termasuk sektor unggulan, yang berarti bahwa sektor tersebut kurang prospektif untuk dikembangkan dan ada kecenderungan justru memerlukan pemenuhan permintaan dari daerah lain.
3. LQ suatu sektor = 1 dikatakan memiliki spesialisasi yang setingkat dengan sektor yang sama pada wilayah yang setingkat lebih luas.

Semakin tinggi nilai LQ suatu sektor berarti semakin tinggi pula *competitive advantage* daerah yang bersangkutan dalam mengembangkan sektor tersebut. Untuk melihat pergeseran pergeseran sektor unggulan di masa yang akan datang digunakan formula *Dynamic Location Quotient (DLQ)* sebagai berikut :

$$DLQ_{ij} = \left[\frac{(1 + g_{ij}) / (1 + g_j)}{(1 + G_i) / (1 + G)} \right] = \frac{IPPS_{ij}}{IPPS_i}$$

Dengan penjelasan :

IPPSij = Indeks potensi perkembangan sektor i di daerah Kabupaten Bungo

IPPSi = Indeks potensi perkembangan sektor i di daerah Provinsi Jambi

gij = Laju pertumbuhan sektor i di Kabupaten Bungo

Gi = Laju pertumbuhan sektor i di wilayah Provinsi Jambi

gj = Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Bungo

G = Rata-rata laju pertumbuhan di wilayah Provinsi Jambi

Kemungkinan nilai DLQ yang diperoleh adalah :

- a. Jika DLQ > 1, maka sektor ini mempunyai potensi perkembangan lebih cepat dibanding daerah kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Jambi.
- b. Jika DLQ < 1, maka sektor ini mempunyai potensi perkembangan lebih lambat dibanding daerah kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Jambi.
- c. Jika DLQ = 1, maka sektor ini mempunyai potensi perkembangan sama cepat dibanding daerah kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Jambi.

Analisis Specialization Index

Model ini digunakan untuk menganalisis tingkat spesialisasi antar sektor di daerah yang menjadi objek penelitian.

$$S1j = \sum_{i=1}^n \left| \frac{E_{ij}}{E_j} - \frac{Eb}{Eb_1} \right|$$

Keterangan :

Sij : Indek Spesialisasi sektor i

Eij : PDRB Sektor i di wilayah studi

Ej : Total PDRB di wilayah studi

E_b : PDRB sektor i di wilayah referensi
 E_{b1} : Total PDRB di wilayah referensi

Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Analisis MRP merupakan alat analisis yang digunakan untuk melihat deskripsi kegiatan ekonomi yang potensial dan kriteria pertumbuhan, dengan formula:

a. Rasio pertumbuhan wilayah studi (RP_S)

$$RP_S = \frac{\Delta E_{ij} / E_{ij(t)}}{\Delta E_{iR} / E_{iR(t)}}$$

RP_S: Perbandingan antara laju pertumbuhan pendapat / kesempatan kerja kegiatan i wilayah studi dengan laju pertumbuhan pendapat / kesempatan kerja kegiatan i wilayah referensi.

b. Rasio pertumbuhan wilayah referensi (RP_R)

$$RP_R = \frac{\Delta E_{iR} / E_{iR(t)}}{\Delta E_R / E_{R(t)}}$$

RP_R : Perbandingan antara laju pertumbuhan pendapatan / kesempatan kerja kegiatan-kegiatan i wilayah dengan laju pertumbuhan total kegiatan (PDRB)/total kesempatan kerja wilayah referensi.

Keterangan :

ΔE_{ij} = Perubahan pendapatan / kesempatan kerja kegiatan i di kabupaten / kota (wilayah studi) pada periode waktu t dan t+n.

n = Jumlah tahun antara dua periode

ΔE_{iR} = Perubahan pendapatan / kesempatan kerja kegiatan i di Propinsi Jambi (wilayah referensi)

E_{ij} = Pendapatan / kesempatan kerja kegiatan i di kabupaten / kota (wilayah studi)

E_{iR} = Pendapatan / kesempatan kerja kegiatan i di Propinsi Jambi (wilayah referensi)

E_R = PDRB / total kesempatan kerja di Propinsi Jambi (wilayah referensi).

Jika nilai RP_R / RP_S lebih besar dari satu maka RP_R / RP_S dikatakan (+) dan jika RP_R / RP_S lebih kecil dari satu dikatakan (-). RP_R (+) menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan / kesempatan kerja suatu kegiatan tertentu dalam tingkat propinsi lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB / total kesempatan kerja Propinsi, demikian juga sebaliknya jika RP_R (-). Sedangkan RP_S (+) menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan / kesempatan kerja suatu kegiatan di kabupaten / kota lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan / kesempatan kerja kegiatan tersebut pada tingkat propinsi, demikian sebaliknya jika RP_S (-).

Dari analisis MRP akan diperoleh nilai riil dan nilai nominal kemudian kombinasi dari kedua perbandingan tersebut akan diperoleh deskripsi kegiatan ekonomi yang potensial pada tingkat kabupaten / kota yang terdiri dari empat klasifikasi yaitu :

a. Klasifikasi 1, yaitu nilai RP_R (+) dan RP_S (+) berarti kegiatan tersebut pada tingkat propinsi mempunyai pertumbuhan pendapatan / kesempatan kerja menonjol dan demikian pula pada tingkat kabupaten / kota. Kegiatan ini selanjutnya disebut sebagai dominan pertumbuhan.

- b. Klasifikasi 2, yaitu $RP_R (+)$ dan $RP_S (-)$ berarti kegiatan tersebut pada tingkat propinsi mempunyai pertumbuhan pendapatan / kesempatan kerja yang menonjol namun pada tingkat kabupaten / kota belum menonjol.
- c. Klasifikasi 3, yaitu nilai $RP_R (-)$ dan $RP_S (+)$ berarti kegiatan tersebut pada tingkat propinsi pertumbuhan pendapatan / kesempatan kerjanya tidak menonjol, akan tetapi pada tingkat kabupaten / kota pertumbuhan pendapatan / kesempatan kerja kegiatan tersebut menonjol. Dari sudut tingkat kabupaten / kota, kegiatan ini diharapkan akan potensial peranannya dalam memberikan kontribusi pertumbuhan propinsi. Oleh karena itu, kegiatan ini merupakan kegiatan potensial yang dapat dikembangkan di Propinsi Jambi.
- d. Klasifikasi 4, yaitu nilai $RP_R (-)$ dan $RP_S (-)$ berarti kegiatan tersebut baik pada tingkat propinsi maupun tingkat kabupaten / kota mempunyai pertumbuhan pendapatan / kesempatan kerja rendah.

Analisis *overlay* dimaksudkan untuk melihat deskripsi kegiatan ekonomi yang potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan (MRP) dan kriteria kontribusi (LQ), terdapat empat kemungkinan dalam analisa *overlay*, yaitu :

- a. Pertumbuhan (+) dan kontribusi (+), menunjukkan suatu kegiatan yang sangat dominan baik dari pertumbuhan pendapatan / kesempatan kerja maupun kontribusi terhadap PDRB / penyerapan tenaga kerja.
- b. Pertumbuhan (+) dan kontribusi (-), menunjukkan suatu kegiatan yang pertumbuhan pendapatan / kesempatan kerjanya dominan tetapi kontribusi terhadap PDRB / penyerapan kerjanya kecil. Kegiatan ini dapat ditingkatkan kontribusi / penyerapan tenaga kerjanya untuk dipacu menjadi kegiatan yang dominan.
- c. Pertumbuhan (-) dan kontribusi (+), menunjukkan suatu kegiatan yang pertumbuhan pendapatan / kesempatan kerjanya kecil tetapi kontribusi / penyerapan tenaga kerjanya besar, kegiatan ini sangat memungkinkan merupakan kegiatan yang sedang mengalami penurunan.
- d. Pertumbuhan (-) dan kontribusi (-), menunjukkan bahwa suatu kegiatan yang kurang menunjang baik dari kriteria pertumbuhan pendapatan / kesempatan kerja maupun dari kriteria kontribusi / penyerapan tenaga kerja.

HASIL dan PEMBAHASAN

Analisis Location Quotient (LQ)

Teori dasar dari model basis ekonomi berpandangan bahwa determinan pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan secara langsung dengan permintaan permintaan dari daerah lain, sehingga dengan adanya permintaan terhadap barang dan jasa merangsang pertumbuhan industri atau sektor lain yang memanfaatkan sumber daya lokal, baik berupa tenaga kerja maupun material, yang pada gilirannya akan membangkitkan perekonomian daerah tersebut. Untuk melakukan analisis basis ekonomi salah satu metode yang digunakan adalah Analisis *Location Quotient* (LQ) yang bertujuan untuk mengetahui dan menentukan sektor ekonomi yang merupakan sektor basis dan non basis. Sektor basis merupakan sektor dengan kegiatan ekonomi yang hasil produksinya dapat melayani pasar baik di dalam maupun di luar batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan sektor non basis merupakan sektor dengan kegiatan ekonomi yang hanya mampu menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang bertempat tinggal di dalam batas perekonomian masyarakat. Bertambah banyaknya kegiatan basis dalam suatu daerah akan menambah arus pendapatan ke dalam daerah yang bersangkutan, menambah permintaan barang dan jasa sehingga akan menimbulkan kenaikan volume kegiatan. Sebaliknya berkurangnya

kegiatan basis akan mengurangi pendapatan suatu daerah dan turunnya permintaan terhadap barang dan jasa sehingga akan menurunkan volume kegiatan.

Dalam proses perhitungannya analisis LQ menggunakan perbandingan antara kondisi perekonomian suatu wilayah dengan perekonomian acuan yang mlingkupi daerah yang lebih luas, dalam penelitian ini membandingkan antara perekonomian Kabupaten Bungo dengan kondisi perekonomian Provinsi Jambi sebagai daerah acuan. Apabila hasil perhitungan menunjukkan angka lebih dari satu ($LQ > 1$) berarti sektor atau sub sektor tersebut merupakan sektor basis. Sebaliknya apabila hasilnya menunjukkan angka kurang dari satu ($LQ < 1$) berarti sektor atau sub sektor tersebut merupakan sektor non basis. Hasil perhitungan LQ Kabupaten Bungo dengan menggunakan PDRB sebagai berikut :

Sektor Pertanian

Berdasarkan hasil perhitungan LQ pada sektor pertanian dalam kurun waktu tahun 2001-2013 maka secara rata-rata sektor pertanian merupakan sektor basis karena nilai LQ nya > 1 . Hal tersebut menandakan kontribusi sektor pertanian di Kabupaten Bungo lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat Provinsi Jambi. Sehingga secara sektoral, sektor pertanian mempunyai kemampuan ekspor ke luar daerah terutama pada sub sektor tanaman bahan makanan, sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya serta sub sektor kehutanan. Keempat sub sektor tersebut rata-rata nilai LQ nya > 1 yang berarti memiliki keunggulan komparatif.

Tabel 2. Indeks LQ Sektor Pertanian Kabupaten Bungo Tahun 2001-2013

No.	Sektor / Sub Sektor	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-Rata
	Pertanian	1,56	1,57	1,56	1,52	1,48	1,27	1,28	1,20	1,29	1,16	1,19	1,11	1,10	1,33
a	Tanaman Bhan Makanan	1,60	1,61	1,60	1,56	1,48	1,30	1,29	1,18	1,25	1,13	1,14	1,07	1,04	1,33
b	Tanaman Perkebunan	1,42	1,42	1,40	1,38	1,37	1,06	1,09	1,03	1,12	1,00	1,01	0,96	0,97	1,17
c	Peternakan dan Hasil-hasilnya	2,33	2,27	2,22	2,12	2,09	2,10	2,19	2,24	2,47	2,24	2,28	2,17	2,12	2,22
d	Kehutanan	2,03	2,24	2,32	2,26	2,40	2,18	2,24	2,19	2,50	2,38	2,62	2,24	2,19	2,29
e	Perikanan	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,27	0,24	0,23	0,24	0,22	0,23	0,22	0,22	0,23

Sumber : BPS Kabupaten Bungo (data diolah).

Sub sektor tanaman bahan makanan memiliki nilai LQ rata-rata 1,33, memberi sumbangan terhadap PDRB rata-rata sebesar Rp. 153.535.410.000,- per tahun dengan kontribusi rata-rata 15,06 % per tahun. Komoditas penting yang berperan terhadap sub sektor tanaman bahan makanan adalah padi sawah dengan dengan luas sawah 7.120 Ha dan produksi per tahun 36.012 ton.

Sub sektor perkebunan memiliki nilai LQ rata-rata 1,17, memberi sumbangan terbesar terhadap PDRB rata-rata Rp. 166.237.440.000,- per tahun dengan kontribusi rata-rata 15,82 % per tahun. Komoditas penting yang berperan terhadap sub sektor perkebunan adalah komoditas karet dan kelapa sawit. Pada tahun 2013 produksi tanaman karet sebesar 41.308 ton dengan luas lahan 98.220 Ha, sementara produksi tanaman kelapa sawit sebesar 16.901 ton dengan luas lahan 10.542 Ha.

Selain itu, sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya juga berperan dalam membentuk nilai LQ yang menempatkan sektor pertanian menjadi sektor basis. Sumbangan nilai tambah ekonomi sub sektor peternakan terhadap PDRB Kabupaten Bungo selama 2001-2013 rata-rata sebesar Rp. 49.499.220.000,- atau rata-rata 4,72 %. Komoditas penting yang berperan terhadap sub sektor peternakan adalah populasi ternak yaitu sapi 22.791 ekor, kerbau 5.100 ekor, ayam pedaging 2.870.072 ekor yang menghasilkan daging dan produk lainnya.

Demikian pula sub sektor kehutanan memiliki nilai LQ rata-rata relatif besae di banding sub sektor lain yaitu 2,29. Sumbangan sektor kehutanan terhadap PDRB rata sebesar Rp. 45.636.220.000,- atau rata-rata 4,57 %. Komoditas penting yang berperan terhadap sub sektor kehutanan adalah hasil hutan berupa kayu bulat dan kayu gergajian.

Pada sektor pertanian hanya ada satu sub sektor yaitu sub sektor perikanan yang memiliki nilai rata-rata LQ < 1, yang berarti merupakan sektor non basis. Sumbangan sektor ini terhadap PDRB per tahun hanya Rp. 3.035.470.000,- atau 0,29 %.

Sektor Pertambangan dan Penggalian

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, rata-rata nilai LQ sektor pertambangan dan penggalian selama tahun 2001-2013 adalah 0,52 (< 1), berarti sektor ini merupakan sektor non basis bagi perekonomian Kabupaten Bungo. Diketahui juga bahwa di Kabupaten Bungo tidak terdapat kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi sehingga walaupun rata-rata nilai LQ sub sektor pertambangan tanpa migas dan sub sektor penggalian >1 sehingga sektor pertambangan dan penggalian bukan merupakan sektor basis. Di Kabupaten Bungo sejak tahun 2006 terdapat kegiatan pertambangan tanpa migas yaitu batu bara nilai LQ nya sangat besar namun berfluktuatif dan cenderung menurun.

Tabel 3. Indeks LQ Sektor Pertambangan dan Penggalian Kabupaten Bungo Tahun 2001-2013

No.	Sektor / Sub Sektor	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-Rata
	Pertambangan & Penggalian	0,07	0,09	0,11	0,13	0,16	0,42	0,72	0,99	0,97	0,82	0,75	0,72	0,75	0,52
a	Minyak & Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Pertambangan Tnp Migas	-	-	-	-	-	5,43	12,00	6,93	-	5,22	4,49	4,36	3,54	6,00
c	Penggalian	1,86	1,85	1,87	1,62	1,90	1,76	1,56	1,55	1,82	1,70	1,86	1,91	1,80	1,77

Sumber : BPS Kabupaten Bungo (data diolah).

Sektor Industri Pengolahan

Berdasarkan tabel di bawah ini nilai LQ sektor industri pengolahan secara rata-rata selama tahun 2001-2013 adalah sebesar 0,37 yang berarti sektor industri pengolahan adalah sektor non basis. Di Kabupaten Bungo hanya ada kegiatan ekonomi sub sektor industri tanpa migas yang semua nilai LQ nya < 1. Pada sub sektor industri tanpa migas terdapat kegiatan ekonomi yang potensial yaitu kegiatan usaha industri semen dan barang galian bukan logam.

Tabel 4. Indeks LQ Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Bungo Tahun 2001-2013

No.	Sektor / Sub Sektor	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-Rata
	Industri Pengolahan	0,40	0,38	0,37	0,37	0,37	0,33	0,34	0,33	0,37	0,34	0,38	0,37	0,38	0,37
a	Industri Migas	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Pengilangan Minyak Bumi	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gas Alam Cair	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Industri Tanpa Migas	0,40	0,40	0,40	0,40	0,39	0,35	0,37	0,35	0,39	0,36	0,40	0,39	0,41	0,39
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	0,46	0,45	0,42	0,43	0,42	0,35	0,35	0,32	0,35	0,30	0,32	0,30	0,32	0,37
2	Tekstil, Brg. Kulit & Alas kaki	0,49	0,48	0,48	0,48	0,49	0,45	0,48	0,47	0,59	0,54	0,55	0,55	0,56	0,51
3	Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya	0,33	0,34	0,34	0,34	0,34	0,32	0,34	0,34	0,39	0,39	0,46	0,45	0,47	0,37
4	Kertas dan Barang Cetak	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
5	Pupuk, Kimia & Brg. dari Karet	0,81	0,84	0,83	0,85	0,85	0,82	0,79	0,75	0,84	0,71	0,72	0,77	0,94	0,81
6	Semen & Brg. Galian bukan logam	1,75	1,74	1,69	1,70	1,69	1,53	1,42	1,24	1,35	1,15	1,18	1,09	1,08	1,43
7	Logam Dasar Besi & Baja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Alat Angk., Mesin & Peralatannya	0,50	0,46	0,43	0,45	0,45	0,41	0,40	0,38	0,43	0,40	0,41	0,40	0,42	0,43
9	Barang lainnya	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03

Sumber : BPS Kabupaten Bungo (data diolah).

Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih

Berdasarkan hasil analisis LQ pada sektor listrik, gas dan air bersih seperti terlihat pada tabel di atas menunjukkan bahwa sektor ini merupakan sektor non basis karena rata-rata nilai LQ nya < 1. Jika dilihat dari sub sektor pembentuknya di Kabupaten Bungo hanya ada kegiatan sub sektor listrik dan sub sektor air bersih yang keduanya juga merupakan sub sektor non basis. Dalam kurun waktu tahun 2001-2013 nilai LQ sub sektor listrik dan sub sektor air bersih cenderung meningkat karena sub sektor ini merupakan sumber energi bagi kegiatan ekonomi sektor-sektor lainnya.

Tabel 5. Indeks LQ Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih Kabupaten Bungo Tahun 2001-2013

No.	Sektor / Sub Sektor	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-Rata
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]
	Listrik, Gas & Air Bersih	0,61	0,58	0,56	0,56	0,62	0,61	0,68	0,68	0,76	0,68	0,69	0,67	0,66	0,64
a	Listrik	0,62	0,59	0,58	0,57	0,65	0,63	0,70	0,69	0,76	0,67	0,67	0,65	0,63	0,65
b	Gas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Air Bersih	0,55	0,52	0,49	0,49	0,51	0,49	0,57	0,62	0,73	0,71	0,80	0,82	0,81	0,62

Sumber : BPS Kabupaten Bungo (data diolah).

Sektor pada Sektor Bangunan

Untuk sektor bangunan di Kabupaten Bungo selama tahun 2001-2013 secara rata-rata nilai LQ nya sebesar 1,45 dan cenderung meningkat, hal ini menunjukkan bahwa sektor bangunan merupakan sektor basis di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Peranan sektor bangunan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bungo rata-rata sebesar Rp. 72.692.570.000,- atau rata-rata 6,20 % per tahun. Sesuai kenyataan bahwa Kabupaten Bungo menjadi sebuah kawasan pertumbuhan baru (*agglomeration*) dari sektor pemerintah dan sektor swasta. Hal ini didukung oleh majunya sektor bangunan dari investasi pemerintah seperti pembangunan bandara udara, pembangunan rumah sakit dan sarana lainnya serta sektor bangunan dari kegiatan investasi swasta yaitu pembangunan ruko-ruko dan pusat pembelanjaan.

Tabel 6. Indeks LQ Sektor Bangunan Kabupaten Bungo Tahun 2001-2013

No.	Sektor / Sub Sektor	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-Rata
	Bangunan	1,24	1,18	1,19	1,32	1,28	1,38	1,39	1,38	1,60	1,57	1,74	1,86	1,72	1,45
a	Konstruksi	1,24	1,18	1,19	1,32	1,28	1,38	1,39	1,38	1,60	1,57	1,74	1,86	1,72	1,45

Sumber : BPS Kabupaten Bungo (data diolah).

Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Hasil analisis LQ terhadap sektor perdagangan, hotel dan restoran menunjukkan sektor tersebut mempunyai nilai LQ > 1 sehingga sektor ini termasuk dalam sektor basis selama periode tahun 2001-2013 seperti terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 7. Indeks LQ Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Kabupaten Bungo Tahun 2001-2013

No.	Sektor / Sub Sektor	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-Rata
	Perdagangan, Hotel & Restoran	1,11	1,12	1,10	1,11	1,09	1,02	1,10	1,16	1,34	1,24	1,30	1,22	1,22	1,16
a	Perdagangan Besar & Eceran	1,08	1,09	1,07	1,07	1,05	0,97	1,06	1,13	1,30	1,20	1,25	1,18	1,18	1,13
b	Hotel	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	0,42	0,57	0,46	0,55	0,50	0,51	0,48	0,51	0,45
c	Restoran	1,49	1,55	1,60	1,64	1,65	1,57	1,70	1,76	2,05	1,95	2,13	2,08	2,08	1,79

Sumber : BPS Kabupaten Bungo (data diolah).

Berdasarkan Tabel 7 terlihat bahwa sub sektor yang merupakan sub sektor yang menjadi sub sektor basis yaitu sub sektor perdagangan besar dan eceran dengan nilai LQ sebesar 1,13 dan sub sektor restoran dengan nilai LQ sebesar 1,79 sedangkan sub sektor hotel bukan merupakan sub sektor basis dengan nilai LQ sebesar 0,45.

Sub sektor perdagangan besar dan eceran memberi sumbangan terbesar terhadap PDRB Kabupaten Bungo, dengan menyumbangkan nilai tambah ekonomi rata-rata sebesar Rp. 192.950.630.000,- atau rata-rata 17,50 %. Hal ini didukung oleh kegiatan ekspor komoditi karet dan CPO, serta perdagangan eceran dengan jumlah pasar tradisional dan modern sebanyak 51 pasar. Sub sektor restoran menyumbangkan nilai tambah rata-rata sebesar Rp. 24.253.410.000,- atau rata-rata 2,25 %. Hal ini didukung oleh majunya perekonomian dan letak Kabupaten Bungo yang dilalui oleh Jalan Lintas Sumatera. Posisi geografis Kabupaten Bungo yang strategis yang menjadi pusat pengumpulan mobilitas barang-barang hasil daerah setempat untuk didistribusikan ke kabupaten lain. Dalam ekonomi wilayah terminologi ini disebut *locational rent*.

Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Hasil perhitungan LQ pada sektor pengangkutan dan komunikasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8. Indeks LQ Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Kabupaten Bungo Tahun 2001-2013

No.	Sektor / Sub Sektor	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-Rata
a	Pengangkutan & Komunikasi	1,05	1,07	1,04	1,06	1,10	0,98	0,98	0,96	1,06	0,99	1,05	1,01	1,06	1,03
	Pengangkutan	1,06	1,07	1,04	1,06	1,10	0,97	0,97	0,94	1,03	0,96	1,01	0,96	1,01	1,01
1	Angkutan Rel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Angkutan Jalan Raya	1,42	1,48	1,48	1,55	1,63	1,45	1,44	1,37	1,51	1,42	1,50	1,42	1,42	1,47
3	Angkutan Laut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Angk. Sungai, Danau & Penyebr.	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Angkutan Udara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,24	0,02
6	Jasa Penunjang Angkutan	0,99	0,98	0,91	0,86	0,84	0,73	0,71	0,68	0,82	0,83	0,99	0,99	1,05	0,87
b	Komunikasi	0,97	1,07	1,03	1,12	1,04	1,03	1,14	1,21	1,40	1,37	1,50	1,52	1,57	1,23
	1 Pos dan Telekomunikasi	0,96	1,06	1,03	1,11	1,03	1,01	1,11	1,17	1,35	1,33	1,45	1,47	1,52	1,20
2	Jasa Penunjang Komunikasi	1,31	1,46	1,73	1,81	1,90	2,53	3,67	4,62	5,50	5,41	5,94	6,05	6,22	3,70

Sumber : BPS Kabupaten Bungo (data diolah).

Berdasarkan Tabel 8, menunjukkan bahwa pada tahun 2001-2013 semua sub sektor yaitu sub sektor pengangkutan dan sub sektor komunikasi merupakan sub sektor basis karena mempunyai nilai rata-rata koefisien $LQ > 1$. Berdasarkan tabel diatas terlihat juga bahwa terdapat kegiatan ekonomi yang potensial yaitu kegiatan angkutan jalan raya dengan nilai LQ sebesar 1,47, kegiatan pos dan telekomunikasi dengan nilai LQ sebesar 1,20, dan jasa penunjang komunikasi dengan nilai LQ sebesar 3,70.

Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Hasil perhitungan LQ pada sektor kegiatan keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dapat dilihat pada Tabel 9. Berdasarkan Tabel 9, menunjukkan bahwa pada tahun 2001-2013 sub sektor yang merupakan sub sektor basis karena mempunyai nilai rata-rata nilai $LQ > 1$ adalah sub sektor sewa bangunan dengan nilai LQ sebesar 1,80 dan sub sektor jasa perusahaan dengan nilai LQ sebesar 1,43. Sedangkan sub sektor yang mempunyai nilai rata-rata koefisien $LQ < 1$ dan bukan merupakan sub sektor basis adalah sub sektor bank, sub sektor lembaga keuangan tanpa bank, dan sub sektor jasa penunjang keuangan.

Tabel 9. Indeks LQ Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Kabupaten Bungo Tahun 2001-2013

No.	Sektor / Sub Sektor	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-Rata
	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1,55	1,58	1,41	1,32	1,31	1,18	1,07	0,87	0,87	0,77	0,77	0,74	0,76	1,09
a	Bank	0,27	0,25	0,23	0,24	0,24	0,25	0,21	0,15	0,14	0,13	0,13	0,12	0,11	0,19
b	Lembaga Keuangan tnp Bank	0,40	0,41	0,38	0,39	0,40	0,39	0,42	0,41	0,45	0,41	0,41	0,39	0,40	0,40
c	Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Sewa Bangunan	1,94	2,01	1,96	1,97	1,93	1,73	1,72	1,63	1,77	1,64	1,69	1,67	1,78	1,80
e	Jasa Perusahaan	0,92	0,98	0,95	0,99	1,11	1,13	1,39	1,48	1,86	1,82	2,01	1,95	2,00	1,43

Sumber : BPS Kabupaten Bungo (data diolah).

Sektor Jasa-Jasa

Hasil analisis LQ pada pada sektor jasa-jasa menunjukkan bahwa sektor ini merupakan sektor basis karena nilai LQ nya > 1, secara rata-rata nilai LQ sektor ini sebesar 1,04 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini yang menunjukkan bahwa pada tahun 2001-2013 sub sektor yang merupakan sub sektor basis karena mempunyai nilai rata-rata koefisien LQ>1 adalah sub sektor swasta. Sedangkan sub sektor yang mempunyai nilai rata-rata koefisien LQ<1 dan bukan merupakan sub sektor basis adalah sub sektor pemerintahan umum.

Tabel 10. Indeks LQ Sektor Jasa-Jasa Kabupaten Bungo Tahun 2001-2013

No.	Sektor / Sub Sektor	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-Rata
	Jasa-Jasa	1,08	1,05	1,06	1,03	1,04	0,97	1,00	0,95	1,05	0,98	1,05	1,10	1,11	1,04
a	Pemerintahan Umum	0,93	0,90	0,92	0,89	0,91	0,85	0,88	0,83	0,92	0,87	0,94	0,99	1,01	0,91
1	Adm. Pemerintah & Pertahanan	0,93	0,90	0,92	0,90	0,91	0,85	0,89	0,84	0,94	0,90	0,98	1,03	1,06	0,93
2	Jasa Pemerintah lainnya	0,93	0,90	0,93	0,88	0,91	0,86	0,85	0,81	0,87	0,81	0,87	0,91	0,92	0,88
b	Swasta	1,86	1,87	1,81	1,74	1,69	1,53	1,56	1,54	1,70	1,54	1,60	1,55	1,60	1,66
1	Sosial Kemasyarakatan	1,89	1,87	1,79	1,73	1,67	1,51	1,58	1,59	1,75	1,57	1,64	1,59	1,62	1,68
2	Hiburan & Rekreasi	1,41	1,48	1,44	1,40	1,41	1,55	1,74	1,79	2,02	1,86	1,95	1,86	1,96	1,68
3	Perorangan & Rumahtangga	1,89	1,97	1,93	1,83	1,79	1,55	1,48	1,38	1,53	1,40	1,46	1,40	1,48	1,62

Sumber : BPS Kabupaten Bungo (data diolah).

Dari 9 sektor pembentuk PDRB terdapat 5 sektor yang mempunyai rata-rata nilai LQ > 1 yang merupakan sektor basis bagi Kabupaten Bungo dengan menggunakan pendekatan LQ yang membandingkan peranan setiap sektor Kabupaten Bungo dengan peranan setiap sektor tingkat Provinsi Jambi selama periode tahun 2001-2013 yaitu sektor pertanian; sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan sektor jasa-jasa. Sedangkan sub sektor yang merupakan sub sektor basis ada 14 sub sektor dari 22 sub sektor yang ada dalam struktur ekonomi Kabupaten Bungo seperti terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 11. Sektor /sub sektor Basis Kabupaten Bungo Selama Periode Tahun 2001-2013

No	Sektor	Sub Sektor Basis
1	Pertanian (basis)	1. Tanaman Bahan Makanan 2. Tanaman Perkebunan 3. Peternakan dan Hasil-Hasilnya 4. Kehutanan
2	Pertambangan dan Penggalian (non basis)	1. Pertambangan tanpa migas 2. Penggalian
3	Industri Pengolahan (non basis)	-
4	Listrik, Gas dan Air Bersih (non basis)	-
5	Bangunan (basis)	1. Bangunan
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran (basis)	1. Perdagangan Besar & Eceran 2. Restoran
7	Pengangkutan dan Komunikasi (basis)	1. Pengangkutan 2. Komunikasi
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (basis)	1. Sewa Bangunan 2. Jasa Perusahaan
9	Jasa-Jasa (basis)	1. Swasta

Sumber : Data Hasil Perhitungan.

Analisis Dynamic Location Quotient (DLQ)

Dalam analisis basis ekonomi ini juga gunakan metode *Dinamic Location Quotient* (DLQ). Prinsip DLQ sebenarnya masih sama sama dengan LQ, hanya untuk mengintroduksikan laju pertumbuhan digunakan asumsi bahwa nilai tambah sektoral maupun PDRB mempunyai rata-rata laju pertumbuhan sendiri-sendiri selama kurun waktu antara tahun (0) dan tahun (t).

Tafsiran atas DLQ sebenarnya masih sama dengan LQ, kecuali perbandingan ini lebih menekankan pada laju pertumbuhan. Jika $DLQ = 1$, berarti laju pertumbuhan sektor i terhadap laju pertumbuhan PDRB daerah Kabupaten Bungo sebanding dengan laju pertumbuhan sektor tersebut pada PDRB Provinsi Jambi. Jika $DLQ < 1$, artinya proporsi laju pertumbuhan sektor i terhadap laju pertumbuhan PDRB daerah Kabupaten Bungo lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan sektor yang sama pada PDB Provinsi Jambi. Sebaliknya, jika $DLQ > 1$, berarti proporsi laju pertumbuhan sektor i terhadap laju pertumbuhan PDRB daerah Kabupaten Bungo lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan sektor yang sama pada PDRB Provinsi Jambi. Kalau keadaan tetap sebagaimana adanya saat ini, maka dapat diharapkan bahwa sektor ini unggul pada masa yang akan datang.

Berdasarkan data laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bungo dan Provinsi Jambi dalam kurun waktu tahun 2001-2013, diperoleh hasil perhitungan DLQ Kabupaten Bungo sebagaimana pada Tabel 12. Dapat diketahui bahwa terdapat 4 sektor yang dapat menjadi sektor basis di masa yang akan datang ($DLQ > 1$), yaitu sektor pertambangan dan penggalian; sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sedangkan menurut sub sektor, maka terdapat 10 sub sektor yang dapat menjadi sub sektor basis pada masa yang akan datang ($DLQ > 1$) yaitu sub sektor kehutanan, sub sektor pertambangan tanpa migas, sub sektor air bersih, sub sektor kontruksi, sub sektor perdagangan besar dan eceran, sub sektor hotel, sub sektor restoran, sub sektor komunikasi sub sektor jasa perusahaan dan sub sektor pemerintahan umum.

Tabel 12. Hasil Perhitungan DLQ Kabupaten Bungo Tahun 2002-2013

Sektor/Subsektor	DLQ
1. Pertanian	0,97
a. Tanaman Bahan Makanan	0,97
b. Tanaman Perkebunan	0,97
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	0,99
d. Kehutanan	1,01
e. Perikanan	1,00
2. Pertambangan & Penggalian	1,28
a. Minyak dan Gas Bumi	
b. Pertambangan Bukan Migas	1,01
c. Penggalian	1,00
3. Industri Pengolahan	1,00
a. Industri Migas	
b. Industri Bukan Migas	1,00
4. Listrik, Gas & Air Bersih	1,01
a. Listrik	1,00
b. Gas Kota	
c. Air Bersih	1,03
5. Bangunan	1,03
a. Kontruksi	1,03
6. Perdag., Hotel & Restoran	1,01
a. Perdagangan Besar & Eceran	1,01
b. Hotel	1,04
c. Restoran	1,03
7. Pengangkutan & Komunikasi	1,00
a. Pengangkutan	1,00
b. Komunikasi	1,04
8. Keu. Real Estat, & Jasa Perusahaan	0,94
a. Bank	0,94
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	1,00
c. Jasa Penunjang Keuangan	
d. Real Estat	0,99
e. Jasa Perusahaan	1,07
9. Jasa-Jasa	1,00
a. Pemerintahan Umum	1,01
b. Swasta	0,99

Sumber : BPS Kabupaten Bungo (data diolah).

Dengan membandingkan hasil perhitungan LQ dan DLQ maka hanya ada 2 sektor yang dapat dinyatakan sebagai sektor basis pada saat ini dan pada masa yang akan datang yaitu sektor bangunan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sedangkan jika melihat hasil perhitungan LQ dan DLQ pada sub sektor maka ada 10 sub sektor yang dapat dinyatakan sebagai sub sektor basis pada saat ini dan pada masa yang akan datang yaitu sub sektor kehutanan, sub sektor pertambangan tanpa migas, sub sektor kontruksi, sub sektor perdagangan perdagangan besar dan eceran, sub sektor restoran, sub sektor komunikasi, sub sektor jasa perusahaan, dan sub sektor pemerintahan umum.

Analisis Indeks Spesialisasi

Berdasarkan penghitungan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa ada 2 sektor yang mempunyai nilai indeks ≥ 1 , yaitu sektor pertanian sebesar 1,30 dan sektor industri pengolahan sebesar 1,12, hal ini berarti bahwa selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2013 di Kabupaten Bungo telah terjadi konsentrasi ekonomi sektor pertanian dan sektor industri pengolahan. Jika dilihat berdasarkan sub sektor, maka

hanya ada 1 sub sektor yang mempunyai nilai indeks ≥ 1 yaitu sub sektor industri tanpa migas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 13. Indeks Spesialisasi Sektor / Sub Sektor di Kabupaten Bungo Tahun 2001-2013

Sektor/Subsektor	Indeks Spesialisasi
1. Pertanian	1,30
a. Tanaman Bahan Makanan	0,49
b. Tanaman Perkebunan	0,30
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	0,34
d. Kehutanan	0,33
e. Perikanan	0,13
2. Pertambangan & Penggalian	0,84
a. Minyak dan Gas Bumi	-
b. Pertambangan tanpa Migas	0,48
c. Penggalian	0,10
3. Industri Pengolahan	1,12
a. Industri Migas	0,09
b. Industri Tanpa Migas **)	1,02
4. Listrik, Gas & Air Bersih	0,04
a. Listrik	0,03
b. Gas	0,00
c. Air Bersih	0,01
5. Bangunan	0,26
a. Kontruksi	0,26
6. Perdag., Hotel & Restoran	0,36
a. Perdagangan Besar & Eceran	0,25
b. Hotel	0,02
c. Restoran	0,13
7. Pengangkutan & Komunikasi	0,04
a. Pengangkutan	0,04
b. Komunikasi	0,02
8. Keu. Persewaan, & Jasa Perusahaan	0,16
a. Bank	0,20
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	0,02
c. Jasa Penunjang Keuangan	0,00
d. Sewa Bangunan	0,24
e. Jasa Perusahaan	0,01
9. Jasa-Jasa	0,05
a. Pemerintahan Umum	0,09
b. Swasta	0,13

Sumber : BPS Kabupaten Bungo (data diolah).

Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Analisis MRP digunakan untuk melihat deskripsi kegiatan ekonomi yang potensial dan kriteria pertumbuhan. Berdasarkan penghitungan yang telah dilakukan dengan Model Rasio Pertumbuhan dapat diketahui bahwa sektor ekonomi yang mempunyai pertumbuhan yang menonjol pada tingkat Kabupaten Bungo dan Provinsi Jambi (klasifikasi 1) ada 3 (tiga) sektor yaitu sektor listrik, gas dan air bersih; sektor bangunan; serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor ekonomi yang menonjol pada tingkat Provinsi Jambi tetapi pada tingkat Kabupaten Bungo tidak menonjol (klasifikasi 2) ada 1 (satu) sektor yaitu sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Sektor ekonomi yang tingkat pertumbuhannya rendah pada tingkat Provinsi Jambi tetapi tinggi pada tingkat Kabupaten Bungo (klasifikasi 3) ada 4 (empat) yaitu sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; sektor pengangkutan dan komunikasi; serta sektor jasa-jasa. Sedangkan sektor ekonomi yang tingkat

pertumbuhannya rendah pada tingkat Provinsi Jambi maupun tingkat Kabupaten Bungo (klasifikasi 4) ada 1 (satu) sektor yaitu sektor pertanian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 14. Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Sektor-Sektor di Kabupaten Bungo

Sektor/Subsektor	RPr	RP _s	Klasifikasi
1. Pertanian	0,88	0,47	4
a. Tanaman Bahan Makanan	0,77	0,31	4
b. Tanaman Perkebunan	1,39	0,54	2
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	0,65	0,88	4
d. Kehutanan	-0,15	0,41	4
e. Perikanan	0,52	1,07	3
2. Pertambangan & Penggalian	0,68	22,73	3
a. Minyak dan Gas Bumi	0,33	-	
b. Pertambangan tanpa Migas	-	-	
c. Penggalian	2,94	1,01	1
3. Industri Pengolahan	0,72	1,00	3
a. Industri Migas	-	-	
b. Industri Tanpa Migas **)	0,63	1,15	3
4. Listrik, Gas & Air Bersih	1,95	1,18	1
a. Listrik	2,12	1,09	1
b. Gas	-	-	
c. Air Bersih	1,13	1,96	1
5. Bangunan	4,32	1,53	1
a. Kontruksi	4,32	1,53	1
6. Perdag., Hotel & Restoran	1,29	1,25	1
a. Perdagangan Besar & Eceran	1,36	1,22	1
b. Hotel	1,71	1,80	1
c. Restoran	0,59	2,11	3
7. Pengangkutan & Komunikasi	0,84	1,10	3
a. Pengangkutan	0,79	0,99	4
b. Komunikasi	1,58	2,06	1
8. Keu. Persewaan, & Jasa Perusahaan	2,44	0,34	2
a. Bank	14,96	0,41	2
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	0,83	1,06	3
c. Jasa Penunjang Keuangan	5,45	-	
d. Sewa Bangunan	0,74	0,90	4
e. Jasa Perusahaan	0,71	3,81	3
9. Jasa-Jasa	0,67	1,15	3
a. Pemerintahan Umum	0,65	1,30	3
b. Swasta	0,74	0,77	4

Sumber : BPS Kabupaten Bungo (data diolah).

Analisis Overlay

Dengan melakukan analisis *overlay* berdasarkan kriteria pertumbuhan (MRP) dan kriteria kontribusi (LQ), sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Bungo dapat dikelompokkan menjadi 4 tipe :

1. Sektor yang sangat dominan baik dari pertumbuhannya maupun kontribusinya terhadap PDRB, yaitu : sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa-jasa.
2. Sektor yang pertumbuhannya dominan tetapi kontribusinya terhadap PDRB kecil yaitu : sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan serta sektor listrik, gas dan air bersih.
3. Sektor yang pertumbuhannya kecil tetapi kontribusinya terhadap PDRB besar yaitu : sektor pertanian serta sektor persewaan dan jasa perusahaan.

4. Sektor yang kurang menunjang baik dari kriteria petumbuhannya maupun dari kriteria kontribusinya terhadap PDRB tidak terdapat di Kabupaten Bungo.

Tabel 15. Analisis Overlay Sektor-Sektor di Kabupaten Bungo Berdasarkan MRP dan LQ

Sektor/Subsektor	MRP			LQ		Tipe
	RPr	RP _s	Kriteria	Rata-Rata	Kriteria	
1. Pertanian	0,88	0,47	-	1,33	+	3
a. Tanaman Bahan Makanan	0,77	0,31	-	1,33	+	3
b. Tanaman Perkebunan	1,39	0,54	-	1,17	+	3
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	0,65	0,88	-	2,22	+	3
d. Kehutanan	-0,15	0,41	-	2,29	+	3
e. Perikanan	0,52	1,07	+	0,23	-	2
2. Pertambangan & Penggalan	0,68	22,73	+	0,52	-	2
a. Minyak dan Gas Bumi	0,33	-		0,00		
b. Pertambangan tanpa Migas	-	-		6,00	+	
c. Penggalan	2,94	1,01	+	1,77	+	1
3. Industri Pengolahan	0,72	1,00	+	0,37	-	2
a. Industri Migas	-	-		0,00		
b. Industri Tanpa Migas **)	0,63	1,15	+	0,39	-	2
4. Listrik, Gas & Air Bersih	1,95	1,18	+	0,64	-	2
a. Listrik	2,12	1,09	+	0,65	-	2
b. Gas	-	-		-		
c. Air Bersih	1,13	1,96	+	0,62	-	2
5. Bangunan	4,32	1,53	+	1,45	+	1
a. Kontruksi	4,32	1,53	+	1,45	+	1
6. Perdag., Hotel & Restoran	1,29	1,25	+	1,16	+	1
a. Perdagangan Besar & Eceran	1,36	1,22	+	1,13	+	1
b. Hotel	1,71	1,80	+	0,45	-	2
c. Restoran	0,59	2,11	+	1,79	+	1
7. Pengangkutan & Komunikasi	0,84	1,10	+	1,03	+	1
a. Pengangkutan	0,79	0,99	-	1,01	+	3
b. Komunikasi	1,58	2,06	+	1,23	+	1
8. Keu. Persewaan, & Jasa Perusahaan	2,44	0,34	-	1,09	+	3
a. Bank	14,96	0,41	-	0,19	-	4
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	0,83	1,06	+	0,40	-	2
c. Jasa Penunjang Keuangan	5,45	-		0,00		
d. Sewa Bangunan	0,74	0,90	-	1,80	+	3
e. Jasa Perusahaan	0,71	3,81	+	1,43	+	1
9. Jasa-Jasa	0,67	1,15	+	1,04	+	1
a. Pemerintahan Umum	0,65	1,30	+	0,91	-	2
b. Swasta	0,74	0,77	-	1,66	+	3

Sumber : BPS Kabupaten Bungo (data diolah).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- Berdasarkan analisis LQ sektor yang menjadi sektor basis yaitu sektor pertanian; sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan sektor jasa-jasa serta terdapat 14 sub sektor basis dari 22 sub sektor yang ada dalam struktur perekonomian Kabupaten Bungo yaitu sub sektor tanaman bahan makanan, sub sektor tanaman perkebunan, sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya, sub sektor

pertambangan tanpa migas, sub sektor penggalian, sub sektor bangunan, sub sektor perdagangan besar dan eceran, sub sektor restoran, sub sektor pengangkutan, sub sektor komunikasi, sub sektor sewa bangunan, sub sektor jasa perusahaan dan sub sektor swasta.

2. Berdasarkan analisis DLQ sektor yang menjadi sektor basis pada masa yang akan datang yaitu sektor pertambangan dan penggalian; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor bangunan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran serta terdapat 10 sub sektor basis pada masa yang akan datang yaitu sub sektor kehutanan, sub sektor pertambangan tanpa migas, sub sektor air bersih, sub sektor konstruksi, sub sektor perdagangan besar dan eceran, sub sektor hotel, sub sektor restoran, sub sektor komunikasi, sub sektor jasa perusahaan dan sub sektor pemerintahan umum. Dengan membandingkan hasil analisis LQ dan DLQ maka hanya ada 2 sektor yang menjadi sektor basis pada saat ini dan pada masa yang akan datang yaitu sektor bangunan dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta terdapat 10 sub sektor yaitu sub sektor kehutanan, sub sektor pertambangan tanpa migas, sub sektor konstruksi, sub sektor perdagangan perdagangan besar dan eceran, sub sektor restoran, sub sektor komunikasi, sub sektor jasa perusahaan, dan sub sektor pemerintahan umum.
3. Perhitungan indeks spesialisasi menunjukkan bahwa sektor pertanian dan sektor industri pengolahan serta sub sektor industri tanpa migas di Kabupaten Bungo telah terjadi konsentrasi ekonomi.
4. Berdasarkan analisis MRP sektor ekonomi dengan pertumbuhan yang menonjol pada tingkat Kabupaten Bungo dan Provinsi Jambi yaitu sektor listrik, gas dan air bersih; sektor bangunan; dan sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sub sektor penggalian, sub sektor listrik, sub sektor air bersih, sub sektor bangunan, perdagangan besar dan eceran, sub sektor hotel dan sub sektor komunikasi.

Saran

1. Untuk memacu perekonomian Kabupaten Bungo, maka Pemerintah Daerah sebaiknya fokus pada sektor/sub sektor unggulan yaitu pada sektor pertanian, sektor bangunan dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran terutama pada sub sektor perkebunan, sub sektor bangunan dan sub sektor perdagangan besar dan eceran karena memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta banyak menyerap tenaga kerja.
2. Sektor pertanian perlu menjadi titik perhatian utama didalam menyusun rencana pembangunan ekonomi Kabupaten Bungo, karena sektor potensial ini menjadi tumpuan dari sebageian besar penduduk Kabupaten Bungo yang bermukim di wilayah pedesaan. Pengembangan lebih lanjut sektor ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
3. Alokasi anggaran untuk sektor/sub sektor unggulan perlu ditingkatkan terutama untuk membantu peningkatan produksi dan kelancaran distribusi. Pemerintah perlu mendorong kegiatan investasi untuk pengembangan industri turunan dari produk CPO dan *Crumb Rubber* yang sangat potensial di Kabupaten Bungo dan Provinsi Jambi.
4. Sektor pertambangan dan penggalian yang merupakan sektor dengan pertumbuhan yang pesat perlu mendapat perhatian yang serius dengan memperhatikan aspek peningkatan kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup sekitarnya. Pengembangan sektor bangunan disesuaikan dengan aspek tata ruang agar menjadi optimal dan dapat menekan konversi lahan pertanian menjadi bangunan, serta gaya arsitektur tetap menjaga ciri khas Kabupaten Bungo sehingga dapat menjadi potensi wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2005). *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Amri A., Junaidi, Yulmardi. (2009). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya*. Bogor. IPB Press
- Alhuzari, (2011) *Analisis Sektor Basis Dan Pergeseran Komposisi Sektora di Kabupaten Muaro Jami Periode Tahun 2000-2010*. Thesis Program Pasca Sarjana Megister Ekonomika Pembangunan Universitas Jambi Tahun 2011
- Arsyad, L. (2004). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPFE, Yogyakarta.
- Azhar, dkk. (2005). *Analisis Sektor Basis dan Non Basis Diprovinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala
- _____, (2008). Badan Pusat Statistik. *Pedoman Penghitungan PDRB Kabupaten Kota*. Jakarta
- _____, (2000-2013). Badan Pusat Statistik Propinsi Jambi. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jambi Menurut Lapangan Usaha*. Jambi
- _____, (2000-2012). Badan Pusat Statistik Kota Jambi. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bungo Menurut Lapangan Usaha*. Bungo.
- Bendavid-Val., Avrom, (1991). *Regional and Local Economic Analysis for Practitioners*, Fourth edition, New York: Prager Publisher.
- Damarsari, R., Junaidi, J., & Yulmardi, Y. (2015). Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 2(3), 161-172.
- Ferdian, V (2007). *Telaah Sektor Unggulan Provinsi Lampung: Sebuah Eksplorasi dengan Data Survey Petensi Desa, PDRB, dan Input-Output*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Jhingan, M.L, (1992). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Terjemahan D. Guritno. Rajawali, Jakarta.
- Magriani, (2012), *Analisis Struktur Ekonomi dan Ketimpangan antar Sektor di Kabupaten Tebo Periode 2001-2010*, Tesis Program Pasca Sarjana Megister Ekonomika Pembangunan Universitas Jambi Tahun 2012
- Mayes Anthoni, dkk. (2013). *Analisis Sektor Unggulan Dengan Pendekatan Location Quation Kabupaten Pelalawan*. Tesis Jurusan Ilmu Ekonomi Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Novita, U.D. (2013). *Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perkonomian Kota Singkawang Dengan Pendekatan Sektor Sektor Pembentuk PDRB*, Tesis, Fakultas Ekonomi Universitas Tanjung Pura Tahun 2013
- Richardson, H.W. (2001). *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional*, Terjemahan Paul Sitohang, Edisi Revisi, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta.
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*, Padang, Baduose Media, Cetakan Pertama, Padang.
- Tabrani, A. (2008). *Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara*, Jurnal, Pusat pengkajian Kebijakan Peningkatan Daya Saing BPPT, Jakarta.
- Tarigan, R. (2007). *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*, PT. Bumi Aksara, Cetakan Keempat, Jakarta.
- Wicaksono, A. (2010). *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bungo* Thesis Program Pasca Sarjana Megister Ekonomika Pembangunan Universitas Jambi Tahun 2010.

Yusral, Y.; Junaidi ; Adi Bhakti. (2015). Klasifikasi Pertumbuhan, Sektor Basis dan Kompetitif Kota Jambi *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 2(4), 209-216